

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2007, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Surabaya.
- Arikunto, Suharmi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 1998, *Akta Otentik Dan Notaris Pada Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, Mandar Maju, Bandung.
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Kansil, C. S. T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cet. ke-12.
- Kohar, A., 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Kristanto, Andi, 2003, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2010, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 1981 , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam* , Liberty, Yogyakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurita, Emma, 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Bandung.
- Pratiwi, Swelandiah Endah dan Anna Kurniawati, *Algoritma Perhitungan Langsung pada Cyclic Redundancy Code 32*, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma.
- Rusli, Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saputro, Anke Dwi, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Setiawan, 1989, *Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Soegondo, R., 1991, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerojo, Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- S.P., Wasis, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang.
- Subekti , R. dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta

Suharjono, 1995 , Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Jakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sumarningsih, F. Eka, 2001 Peraturan Jabatan Notaris, *Diktat Kuliah Program Studi Notariat*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyudi, Johan, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Perspektif* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVII No. 2, Mei, 2012.

## **B. Jurnal/ Artikel/ Tesis**

Indrajab, Fidwam, “Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exerco”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

M., Ida Bagus Gde M. B., “Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Digital Menuju Era Cyber Notary”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Pratiwi, Swelandiah Endah dan Anna Kurniawati, “Algoritma Perhitungan Langsung pada Cyclic Redundancy Code 32”, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma, Depok.

Sumarningsih, F. Eka., “Peraturan Jabatan Notaris : Diktat Kuliah Program Studi Notariat”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Wahyudi, Johan, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan”, *Perspektif* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVII No. 2, Mei, Surabaya, 2012.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

5817 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4843.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **D. Internet**

<http://www.indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-otentik/>,

diakses pada tanggal 2 September 2016, pukul 15.03 WIB.